ANALISIS / ARTIKEL

0

Pondasi Serikat Pekerja (Bag. 1)

BY KOLEKTIF ANARKIS.ORG · APRIL 27, 2016

Pamflet Émile Pouget yang menguraikan kapitalisme dan tanggapan pihak sindikalisme revolusioner.

Pamflet "Suara Pekerja"
Dipublikasi tahun 1908 oleh T.H. Keell,
127 Ossulston St., London, N.W.

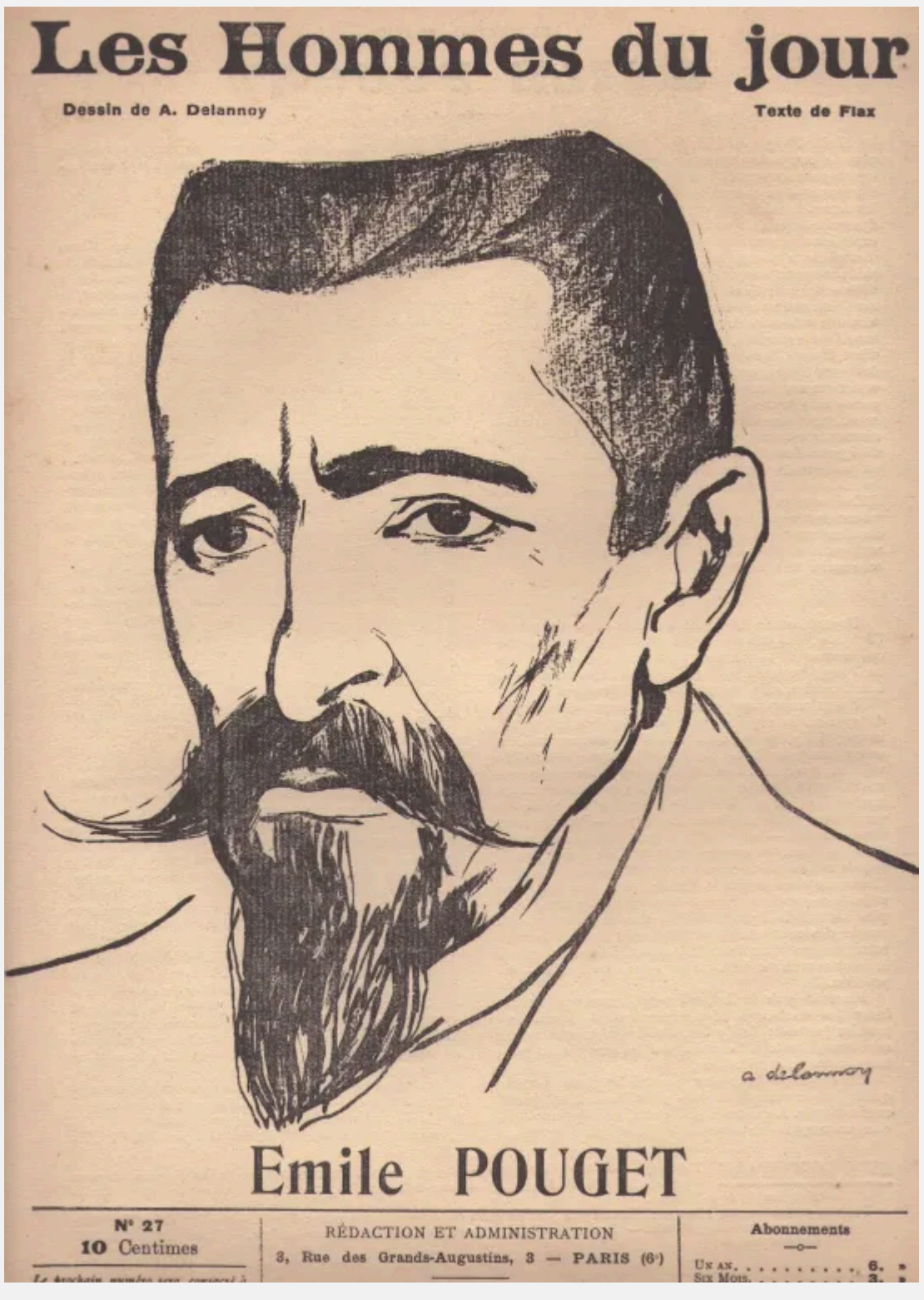

Émile Pouget. Sumber: Wikipedia

Definisi Serikat Pekerja1

Belakangan ini istilah "serikat pekerja" memiliki arti lebih luas dari makna

TULISAN TERBARU

- Kate Sharpley Library: Obituari Stuart Christie
- Apa Yang Dilakukan Franco Padaku
- Gagasan Dasar Pemikiran Bakunin
- Bagaimana Sepakbola Diterima dalam Anarkisme: Wawancara dengan Gabriel Kuhn
- Tuhan dan Negara: Dari Ovidius hingga Bakunin
- Anarkisme dan Perangkat Lunak Bebas Terbuka
- Tarian Cinta dan Revolusi Emma Goldman
- Krisis Gerakan Ekologi
- Anarkisme di Indonesia
- Menyoal Kepercayaan Sang Anarkis

sebelumnya. Istilah tersebut kemudian menentukan “anggota-anggota dari sebuah organisasi serikat pekerja.” Disamping definisi yang hambar dan samar-samar ini, yang dengan maksud tertentu bisa dilabelkan untuk serikat pekerja “Kuning” demikian juga “Merah”. Istilah tersebut telah mendapatkan arti yang baru dan sangat spesifik.

Istilah “serikat pekerja” telah menjadi sebuah istilah yang lengkap: ia adalah kekuatan impulsif dari para pekerja berkesadaran, untuk bergerak maju. Para pekerja yang mengeluarkan seruan ini telah mengesampingkan hal-hal yang tak sehat dan menipu serta telah meyakini bahwa sebuah perbaikan — baik secara sebagian maupun hingga tahapan yang ekstrim — hanya dapat dihasilkan dari kekuatan dan keinginan rakyat. Di atas puing-puing harapan membebek, berisi kepercayaan-kepercayaan mistik terhadap keajaiban yang diharapkan dari Penyelenggara Negara seperti halnya Penyelenggara Semesta, mereka akhirnya menjabarkan sebuah doktrin yang sehat dan manusiawi, yang dasar-dasarnya telah terjelaskan dan dibuktikan oleh fenomena sosial.

Para anggota serikat pekerja jelaslah merupakan bagian dari pekerja yang berkelompok lewat serikat pekerja, hanya saja ia tak ikut menganggap serikat pekerja sebagai sebuah alat untuk menyempitkan visi hingga ke lingkup debat harian dan pertengkaran dengan majikan; dan meski untuk saat ini ia juga berjuang untuk menyelesaikan keluhan-keluhan kecil, ia tak pernah mengesampingkan kejahatan yang muncul dari eksploitasi pekerja. Ia juga tidak menerima serikat pekerja sebagai, seperti halnya diyakini kaum politisi, sebuah “sekolah Sosialisme”– dimana orang-orang direkrut dan dilatih menjadi petarung yang agresif dalam hal-hal yang mereka anggap efektif dan layak: untuk mendapatkan kekuasaan di kursi pemerintah.

Bagi kaum serikat pekerja, serikat adalah sebuah kombinasi sempurna yang menjawab semua kebutuhan, semua aspirasi, dan karena itu mencukupi untuk semua tujuan. Ia adalah asosiasi yang diangankan kaum “reformis” yang mengambil kesempatan untuk melakukan konflik harian dengan para majikan, untuk peningkatan kondisi kerja, dan untuk menyelesaikan klaim-klaim kecil.

Namun serikat pekerja bukan sekedar hal itu saja; ia juga merupakan sebuah kombinasi yang mampu merampaskan kapital dan menata ulang masyarakat, yang bagi sejumlah kaum Sosialis, yang tertipu dengan keyakinan mereka terhadap “Negara” — keyakinan bahwa hal itu bisa dicapai dengan cara merampas kekuasaan politik.

Karena itu, bagi kaum serikat pekerja, perserikatan bukanlah sebuah kegiatan sementara, yang hanya cocok untuk saat ini, yang kegunaannya tak bisa dipisahkan dari keadaan yang ada saat ini. Bagi mereka serikat pekerja adalah kombinasi awal yang penting; yang harus bangkit secara spontan, independen dari semua teori yang dipegang sebelumnya, dan berkembang dalam lingkungan apapun.

Faktanya, apalagi yang lebih masuk akal dibandingkan bergabungnya mereka yang dieksploitasi dari bidang-bidang kerja yang sama, untuk sepakat bersatu dalam mempertahankan keuntungan-keuntungan yang dapat diraih saat itu juga.

Di sisi lain, apabila masyarakat kapitalis telah dimusnahkan dan masyarakat Komunis atau masyarakat lain telah tumbuh berkembang di reruntuhan tersebut, akan terbukti bahwa dalam situasi-situasi ini, dalam lingkungan-lingkungan baru ini, kebutuhan akan asosiasi, menyatukan orang-orang yang bekerja dalam pekerjaan atau tugas yang identik atau serupa, akan menjadi hal yang sangat darurat.

Karena itulah serikat pekerja, lembaga di perusahaan itu, nampak sebagai sel organik dari semua masyarakat. Pada saat ini, bagi kaum serikat pekerja, ia adalah sebuah organisme konflik dan gugatan kaum pekerja melawan majikan. Di masa depan, ia akan menjadi landasan dimana masyarakat yang normal akan dibangun, ketika telah dibebaskan dari eksploitasi dan penindasan.

Pertarungan Kelas Pekerja di Abad Sembilan Belas

Konsepsi awal serikat pekerja bukanlah hasil dari sebuah sistem hipotesis yang muncul dari beberapa otak saja dan tak dibuktikan dengan uji coba praktek. Sebaliknya, ia berproses dari analisa kejadian-kejadian bersejarah serta

penerjemahnya yang jernih. Kami dapat mengatakan bahwa hal itu merupakan hasil dari konflik di antara kelas pekerja dan kelas menengah sepanjang abad.
Sepanjang abad sembilan belas kaum proletar berjuang untuk memisahkan pergerakannya dari aksi yang sepenuhnya politik, yang dilakukan oleh partai-partai kelas menengah. Ini memang merupakan upaya yang sangat besar, bagi kelas menengah yang menginginkan untuk memerintah tanpa rintangan. Persetujuan atau ketidakpedulian dari kaum proletar adalah hal yang dibutuhkan mereka. Para politisi bukan hanya melawan dan membantai kaum proletar ketika bangkit melawan para penindasnya, namun juga membuat mereka menjadi penurut akibat pendidikan palsu yang dirancang untuk mengalihkan mereka dari ujian pertanyaan-pertanyaan ekonomis, serta menyebabkan energi mereka bergeser ke arah harapan demokrasi yang menipu.
Kami tak bisa membuat ini menjadi lebih jelas lagi, bahwa gerakan kelas pekerja yang otonom selalu, dan masih, terhalang oleh semua kekuatan reaksi yang tidak jelas. Mereka juga dihalangi kekuatan demokrasi yang merupakan (dibalik topeng barunya yang munafik) kelanjutan dari masyarakat lama dimana sejumlah kecil parasit dihidupi oleh sejumlah besar pekerja paksa dan kelas bawah yang sangat besar jumlahnya.
Kaum kelas menengah, melalui Negara yang berfungsi (terlepas dari bentuknya) untuk melindungi kemewahan-kemewahan kapitalis, merapuhkan dan membelokkan aspirasi kelas pekerja. Karena itu, sepanjang upaya-upaya untuk mencapai emansipasi, kaum proletar telah gagal menyadari bahwa Pemerintah yang mereka harapkan itu selalu sama saja, tak peduli nama apapun yang mereka pasang. Mereka berpindah dari satu Undang-Undang ke yang lainnya tanpa menghasilkan perubahan apapun, yang seringkali disebut oleh sejarah sebagai hal yang luar biasa penting. Semua pemerintahan memperlakukan kaum pekerja dengan kebencian dan niat buruk. Ketika dari penguasa, mereka mendapatkan keringanan atas nasib buruk, mereka merengkuhnya tanpa perlu berhutang soal hal ini kepada perasaan belas kasihan, namun kepada ketakutan yang bermanfaat yang dapat mereka inspirasikan. Terhadap inisiatif dari pemerintah, mereka hanya berhutang semua legislasi yang menindas, tindakan-tindakan yang sewenang-wenang, dan pembalasan yang kejam.
Antagonisme di antara negara dan kelas pekerja mendominasi seluruh abad sembilan belas. Kita dapat melihat hal itu secara jelas saat kita mengamati pemerintah. Lewat bagaimana mereka melempar musuh-musuhnya dengan tulang-tulang untuk dikunyah dan seketika mengakui hak-hak politik rakyat. Sementara mereka telah memperlihatkan sendiri betapa keras kepalanya mereka jika menyangkut kebebasan ekonomi. Untuk yang terakhir ini, mereka hanya mengalah kepada tekanan rakyat.
Perbedaan sikap di pihak penguasa sangatlah mudah dijelaskan. Pengakuan hak-hak politik masyarakat tak mengganggu pihak pemerintah, selagi celotehan ini tidak membahayakan prinsip-prinsip otoritas dan tidak mengabaikan pondasi kelas di dalam masyarakat.
Ceritanya menjadi agak berbeda jika kebebasan ekonomilah yang dipertanyakan. Ini adalah keuntungan nyata bagi rakyat, dan hanya dapat dicapai dengan pengorbanan kaum yang mendapat keistimewaan. Karena itu Negara, sebagai penyokong kapitalisme, menolak habis-habisan untuk memberikan satu partikel pun kebijakan bagi perbaikan ekonomi.
Dengan menunjukkan adanya konflik permanen antara kelas pekerja dengan Negara, itu akan membawa kita ke dalam penulisan para martir kelas pekerja. Untuk membuktikan kebenaran dan konsistensi dari antagonisme ini, pemaparan beberapa titik bersejarah telah cukup.
Kurang dari dua tahun setelah pengambil-alihan penjara Bastille (Juni 1791), kaum borjuis — lewat juru bicaranya — yaitu Majelis Konstituate Nasional, dengan segera memutuskan untuk mencabut hak kelas pekerja untuk membentuk asosiasi2, sebuah hak yang baru saja mereka dapatkan dengan cara revolusioner.
Para pekerja yakin bahwa Revolusi tersebut adalah awal dari kebebasan ekonomi.

Mereka berpikir bahwa membakar gerbang-gerbang kota Paris dimana pajak kota dikumpulkan (12 Juni 1789) akan menghancurkan semua pembatasan. Mari kita tambahkan bahwa dua hari setelah pembakaran gerbang-gerbang Paris, Bastille telah direbut dengan sebuah sebuah serangan, bukan karena itu merupakan penjara politik, namun karena itu merupakan bahaya bagi kaum pemberontak Paris, seperti halnya Mont Valérien di tahun 1871.

Para pekerja yang larut dengan antusiasme para pembuat pamflet, mengira bahwa mereka telah terbebas dari kungkungan rezim masa lalu, dan mulai memahami satu sama lain lalu berkelompok untuk melawan eksploitasi. Mereka merumuskan klaim mereka dengan teliti. Para borjuis segera membuktikan terhadap mereka bahwa Revolusi tersebut hanyalah bersifat politis dan bukan ekonomis. Mereka mengeluarkan undang-undang yang menindas; dan karena kurangnya pengalaman dan pengetahuan para pekerja, karena agitasi mereka yang membingungkan dan tidak koheren; tidaklah sulit bagi pemerintah untuk mengalahkan gerakan ini.

Kita tak boleh salah duga bahwa hukum Chapelier telah cukup bijak, dan bahwa mereka yang memberikan suara bagi keputusan itu telah mengabaikan dampaknya bagi kehidupan sosial. Untuk membuat kita menelan interpretasi fantasi ini, kita telah diberitahu bahwa kaum Revolusionis pada periode itu tak melakukan protes apapun untuk melawan hukum ini. Keheningan mereka hanya menunjukkan bagi kita, bahwa mereka mengabaikan aspek sosial dari Revolusi dimana mereka turut ambil bagian, dan bahwa mereka hanyalah kaum Demokrat murni. Lebih dari itu, tidak ada yang menakjubkan soal padangan jangka panjang mereka mereka. Bahkan hari ini kita masih melihat orang-orang yang berpura-pura sebagai Sosialis padahal mereka hanyalah sekedar kaum Demokrat saja.

Sebagai bukti bahwa kaum parlementarian 1791 mengetahui apa yang mereka lakukan; beberapa bulan setelahnya, pada bulan September 1791, Majelis Konstituate Nasional menguatkan hukum Chapelier; hukum yang melarang persatuan di kalangan pekerja industri, dengan memberlakukan hukum lain yang membuat perkumpulan bagi pekerja agrikultur juga ilegal.

Majelis tersebut bukanlah satu-satunya Majelis yang mengeluarkan kebenciannya terhadap massa pekerja. Semua Majelis yang terbentuk sesudahnya berusaha mengencangkan ikatan yang memperbudak pekerja kepada majikannya. Lebih lagi, memandang bahwa aturan yang dikeluarkan, yang membuat hampi mustahil bagi kaum pekerja untuk mendiskusikan dan melindungi kepentingannya, ternyata tidaklah cukup, perkumpulan-perkumpulan borjuis terus berusaha untuk memperburuk posisi yang terkutuk kaum proletar itu, dengan menempatkan mereka di bawah kontrol absolut para polisi.

Majelis Kovensi tidak terbukti lebih simpatik kepada kelas pekerja. Pada bulan Nivóse di tahun kedua, ia menyatakan “menentang koalisi pekerja yang bekerja di bidang-bidang berbeda, yang dengan tulisan ataupun para wakilnya melakukan penghasutan hingga munculnya mogok kerja.” Sikap Konvensi, sikap revolusioner yang mendapatkan begitu banyak pujian, jelas-jelas membuktikan bahwa opini politik tak ada hubungannya sama sekali dengan kepentingan ekonomi. Bukti yang lebih baik adalah selain perubahan-perubahan di dalam bentuk pemerintahan, mulai dari Demokrasi hingga Konvensi, Autokrasi Napoleon 1, Monarki Charles X, hingga Konstitusionalisme Louis-Phillipe, kesewenang-wenangan hukum terhadap kaum pekerja tak pernah mereda.

Di bawah Konsulat, pada tahun XI (1803), sebuah mata rantai baru perbudakan ditempa – Buku Sertifikat yang menjadikan pekerja menjadi sebuah kelas yang individu-individunya didaftarkan secara sendiri-sendiri. Kemudian, dengan prosedur legal yang lihai dan jahat serta pengacara-pengacara mereka yang menuliskan Kode yang masih membuat kita menderita hingga sekarang, para pembuat peraturan mengikat dan menyumpal kaum proletar dengan begitu baik hingga Louis XVIII dan Charles X, pewaris bingkisan ini, tidak merasa butuh untuk memperbaikinya.

Meskipun begitu, di tengah pelarangan legislatif yang ketat, para pekerja mendapatkan pemahaman, mereka mulai berkelompok di dalam bentuk-bentuk yang lunak seperti “mutualitas”, dan membentuk embrio serikat pekerja untuk

mengorganisir perlawanan. Kombinasi tersebut tumbuh hingga sebuah titik dimana terjadinya pemogokan berulang; kemudian pemerintahan Liberal milik Louis-Phillipe memberikan hukuman lebih besar bagi perkumpulan pekerja (1834). Namun dorongan tersebut telah terjadi! Luapan kekejaman hukum ini tidak menghentikan pergerakan pekerja. Mengesampingkan hukum tersebut, Sociétés de Résistance terus berlipat ganda, dan diikuti oleh sebuah periode agitasi yang terus tumbuh, serta pemogokan kerja yang berjumlah besar.

Revolusi 1848 adalah hasil dari gerakan ini. Sebuah bukti dari cakupan ekonomi Revolusi ini adalah masalah-masalah ekonomis diprioritaskan di atas semua perkara lainnya. Sayang sekali, kelompok perlawanan kurang pengalaman. Para pekerja di perkotaan mengabaikan para petani, dan sebaliknya. Karena itu pada tahun 1848 para petani tidak tergerak dan tidak memahami gerakan kelas pekerja; seperti di tahun 1852 ketika para pekerja kota tak memahami apapun dari usaha insureksi kaum petani. Di samping kegagalan ini – dan masih banyak yang lain – semua kemajuan ini diakibatkan oleh energi kelas pekerja. Adalah keinginan para pekerja yang diekspresikan pada Komisi Luxembourg dan secara legal disahkan oleh Pemerintahan Sementara.

Pada jam-jam pertama Revolusi tersebut, kelas menengah yang ketakutan menunjukkan keinginan untuk berdamai, untuk menyelamatkan kapitalisme dengan mengorbankan beberapa kemewahan yang remeh. Namun mereka dengan segera teryakinkan kembali, dengan imunisasi masyarakat akibat sebuah virus politik – hak pilih universal – dengan adanya inkonsistensi dari organisasi perlawanan, keganasan mereka menjadi sebesar ketakutan mereka. Pembantaian Juni 1848 bagi kaum kelas menengah adalah pemenuhan kepuasan awal. Segera setelah peristiwa itu, pada tahun 1849, para perwakilan masyarakat membuktikan diri mereka sebagai sekedar perwakilan kelas menengah, mereka mengesahkan hukum yang menentang adanya perkumpulan. Semua perkumpulan dilarang, dan anggota-anggotanya diberikan hukuman sesuai dengan tata hukum di tahun 1810.

Reaksi dari Louis-Phillipe gagal mengalahkan pergerakan kelas pekerja, dan begitu pula pemerintahan Republikan dan Napoleonis. Tanpa mempermasalahkan lagi bentuk pemerintahan atau larangan untuk berkelompok, kelompok-kelompok perlawanan terus berkembang dalam jumlah dan kekuatan dengan begitu besar hingga dengan tekanan mereka kepada otoritas publik dapat memeras pemerintah untuk melakukan sanksi legal. Perbaikan dan kebebasan yang mereka peroleh dengan paksa, adalah berkat semangat revolusioner mereka.

Itu adalah apa yang kita kenal sekarang dengan Aksi Langsung, hak berhimpun yang telah berhasil diperas dari Caesarisme pada tahun 1864. Para pekerja dari semua asosiasi mengelompokkan diri mereka sendiri bersatu dan melakukan pemogokan tanpa mengindahkan hukum sama sekali. Lebih dari yang lainnya, para pekerja cetak menandai diri mereka sendiri dengan karakter yang revolusioner, dan di Paris (1862) salah satu dari pemogokan yang mereka lakukan menjadi kejadian penentu yang membawakan kesadaran akan hak untuk berhimpun. Pemerintah mereka, buta seperti semua pemerintah yang lainnya, mencoba membunuh pergerakan tersebut dengan memberikan serangan yang besar. Penangkapan menyeluruh dilakukan. Seluruh anggota dari komite pemogokan dipenjara, seperti halnya anggota yang paling aktif dari pemogokan tersebut.

Penyalahgunaan kekuasaan yang sewenang-wenang ini, alih-alih menakut-nakuti, ia justru memancing opini publik, dan menghasilkan gelombang kemarahan akibat kejadian tersebut hingga pemerintah telah dipaksa untuk menyerah dan mengesahkan hak pekerja untuk berhimpun. Hal ini hanya disebabkan oleh tekanan yang tak terduga. Akan sulit untuk menyematkan sukses ini kepada wakil-wakil kaum Sosialis, sebuah alasan yang sangat baik mengapa tak ada satupun dari mereka yang berhasil ada di Parlemen.

Penaklukan hak untuk berhimpun sangat menstimulasi organisasi serikat pekerja, ia berkembang begitu cepat tanpa tertahankan, hingga pemerintah terpaksa memasang wajah baik terhadap masalah yang pelik ini. Pada tahun 1863 kebebasan serikat pekerja diakui oleh lingkaran Kekaisaran, yang mengatakan “Terkait

organisasi dari asosiasi kelas pekerja, Administrasi (pemerintah) harus memberikan kebebasan penuh untuk mereka-mereka tertarik bergiat di dalamnya.”
Sementara itu, Asosiasi Pekerja Internasional atau Internasionale (yang secara definitif dikonstitusikan pada tahun 1864) setelah beberapa upaya tanpa hasil sebelumnya, memberikan cahaya kepada Eropa Barat dan membuka horison baru bagi kelas pekerja; horison yang telah dikaburkan oleh krisis besar pada tahun 1871.
Mari kita sekarang berhenti, agar tidak terlalu jauh terbawa dalam rangkuman retrospeksi ini, dan mari mengambil kesimpulan logis dari sini.
Dari catatan sejarah yang telah kita sebutkan, dibahas bahwa pada awal dari rezim saat ini bahwa pada tahun 1791, pemerintah sebagai pelindung kemewahan kelas menengah, menyangkal dan menolak hak-hak para pekerja dan menggilas mereka rata hingga mirip partikel debu — tanpa keterikatan satu sama lain — hingga mereka jatuh di bawah belas kasihan eksploitasi.
Kemudian dari para pekerja yang muncul dari kekacauan, dimana kelas menengah ingin mereka tetap berada, pekerja mengelompokkan diri atas dasar ekonomi; yang terpisah dari politik apapun. Pemerintah, dengan label apapun dia, mencoba memenjarakan pergerakan proletar dan tidak berhasil, kemudian berubah pikiran dan menyetujui perbaikan atau kebebasan yang didapat para pekerja. Inti yang paling menonjol dari semua agitasi dan kejutan sosial ini adalah bahwa terdapat yang tertindas dan penindas, yang diperintah dan pemerintah, dan mereka memiliki kepentingan yang tak sekedar berbeda — namun juga berlawanan; dan bahwa di antara mereka terdapat perang kelas dalam makna sesungguhnya.
Dalam rangkuman singkat yang telah diberikan, kita dapat melihat pergeseran dalam pergerakan serikat pekerja tanpa kungkungan kontaminasi parlementer, kebijakan dari asosiasi pekerja yang berlandaskan pada perkara ekonomi yang solid — yang merupakan landasan bagi semua kemajuan yang sesungguhnya.

KESEPAKATAN AGAR DAPAT HIDUP

Landasan dari Harmoni Sosial

Setelah mendemonstrasikan, bahwa dari sudut pandang sejarah, pergerakan serikat pekerja abad 20 adalah konsekuensi normal dari perjuangan kelas pekerja abad ke-19, kita sekarang harus menguji nilai gerakan ini dari sudut pandang filosofis dan sosial. Untuk memulainya, mari kita letakkan dasar-dasar pemikiran dalam beberapa baris. Manusia adalah binatang sosial. Ia tak dapat, dan tak akan pernah bisa, hidup dalam dunia yang terisolasi. Mustahil membayangkan hidup seseorang manusia yang tak mengambil bentuk kelompok sosial. Seberapun tak berkembangnya pengelompokkan pada manusia primitif, manusia selalu bergabung dalam perkumpulan. Adalah benar, Jean-Jacques Rousseau, seorang teoritisi demokratis, dalam ajarannya mengatakan – bahwa sebelum mereka membentuk masyarakat, manusia hidup dalam “kondisi alami”, dan hanya dapat berkembang dari tahap itu saat mereka melepaskan beberapa dari hak alami mereka dengan cara melakukan “kontrak sosial.”
Omong kosong, yang ketinggalan jaman ini, sangat populer pada akhir dari abad ke-18. Ia menginspirasikan para revolusioner kelas menengah di tahun 1789-93, dan terus berlanjut menjadi landasan hukum dan institusi yang menghambat kita.
Seberapapun kelirunya sufisme Jean-Jacques Rousseau, ia menguntungkan dengan memberikan lapisan filosofis dari prinsip otoritas, dan menjadi ekspresi teoritis kepentingan kelas menengah. Untuk alasan inilah kelas menengah membuat versi mereka sendiri. Filosofi ini tergambar di “Deklarasi Hak Asasi Manusia” juga dalam artikel-artikel “Kode” hukum, hingga diaturlah secara lengkap : kompendium dominasi dan eksploitasi.
Namun tidak juga benar, seperti yang diklaim oleh para Darwinis, bahwa masyarakat adalah tanah peperangan dimana perjuangan untuk keberadaanlah yang mengatur aksi manusia. Teori ini selain mengerikan dan keliru, memberikan lapisan hias ilmiah yang munafik dan palsu kepada bentuk terburuk eksploitasi. Dengan cara ini, kelas menengah memberikan konstruksi bahwa para penindas adalah kaum kuat yang diproduksi oleh seleksi alam, dimana yang tertindas adalah kaum lemah, korban dari sebuah keharusan yang tak kasat mata (dan juga alami); dan bahwa yang lemah

dipaksa untuk hidup seperti tumbuhan, atau menghilang selagi kaum yang kuat mengambil keuntungan dari salah satu solusi ini.

Teori seperti itu hanya dapat berakar pada interpretasi yang sewenang-wenang dan keliru dari ide-ide Darwin. Lagipula apabila ia memang benar, ia hanya bisa diterapkan kepada spesies lain. Peperangan di dalam satu spesies adalah kecelakaan yang mengerikan; bahkan bila dilakukan kepada spesies lain yang hidup dalam asosiasi ia tetap tidak alami, karena harmoni adalah kebutuhan yang tak terbantahkan.

Kesepakatan agar tetap hidup, jauh dari menyebabkan menurunnya individualitas pada manusia, adalah cara untuk memperoleh dan menggandakan kapasitas kesejahteraannya. Pengujian kondisi sebenarnya dari kehidupan yang berlaku pada spesies manusia berakhir dalam penolakan teori yang disebarkan kelas dominan, teori-teori yang hanya bertujuan untuk memfasilitasi dan membenarkan eksploitasi massa.

Memang, meskipun kedua doktrin itu – demokratisme dari JJ Rousseau di abad ke-18th dan Darwinisme dari kelas menengah abad ke-19 memiliki perbedaan teoritis, keduanya tiba pada kesimpulan yang sama: mereka mengklaim semangat penyangkalan, selagi mengajarkan bahwa “kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan orang yang lain.” Melalui doktrin-doktrin ini semangat pengorbanan yang bahkan tak lagi populer dan hina dalam aspek relijius, telah dimunculkan kembali dan menjadi prinsip sosial. Doktrin-doktrin ini mengajarkan bahwa begitu seseorang sepakat untuk hidup di dalam masyarakat, ia harus sepakat untuk mengorbankan hak-hak alaminya. Pengorbanan ini ia lakukan di altar otoritas dan properti, dan sebagai gantinya ia mendapatkan harapan untuk dapat menikmati hak yang tersisa dari pengorbanannya.

Bangsa-bangsa modern telah dipimpin oleh metafisika yang kini mengenakan topeng ilmiah, topeng demokrasi, mereka membungkukkan punggung dan mengorbankan hak-hak mereka; karena doktrin-doktrin ini telah terpatri ke dalam mereka begitu dalam hingga hari ini. Bahkan penduduk yang bangga karena merasa teremansipasi secara intelektual, menerimanya sebagai sebuah aksiom yang tak dipertanyakan lagi—bahwa kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan orang yang lainnya.

Formula kebohongan ini tak akan sanggup diuji; ia memiliki arti yang tak lebih tak kurang daripada sebuah antagonisme yang konstan dan berulang di antara manusia. Apabila ia memiliki kebenaran di dalamnya, kemajuan akan menjadi mustahil, karena kehidupan hanya akan menjadi perjuangan berkelanjutan dari amukan binatang buas yang liar. Karena apabila binatang manusia hanya dapat memuaskan keinginannya dengan mencelakakan sesama manusia yang lainnya, itu berarti pertarungan, peperangan dan kebuasan tak akan pernah ada habisnya.

Namun disamping semua teori kriminal yang merepresentasikan masyarakat sebagai tanah peperangan, dan manusia sebagai makhluk-makhluk yang hanya mampu untuk ada apabila mereka melukai satu sama lain atau merobek-robek satu sama lain hingga hancur dan saling melumat; kita telah mendapati kemajuan, dan ide solidaritas telah berkembang, karena insting dari harmoni sosial jauh lebih kuat dibanding teori-teori perjuangan keberadaan.

Penyederhanaan ini mungkin akan ditolak oleh beberapa orang, yang mengatakan bahwa negara adalah agen kemajuan, dan bahwa intervensinya telah membantu memberikan moral dan menenangkan. Tuduhan ini melengkapi sufisme yang dikutip di atas. “Keteraturan” yang diciptakan oleh negara hanya dilakukan dengan menekan dan menindas massa, dengan tujuan agar kaum minoritas yang teruntungkan dapat terus mendapatkan keuntungannya, sementara massa ditundukkan oleh keyakinan yang ditanamkan kepada mereka, termasuk pula pengakuan bahwa penyerahan sebagian dari “hak alami” mereka adalah keharusan, apabila mereka sepakat dengan “kontrak sosial.”

Kita harus menentang definisi kelas menengah atas kebebasan yang menyetujui perbudakan dan penderitaan dengan sebuah formula yang berlawanan, yang merupakan ekspresi sebenarnya dari kenyataan sosial, yang bangkit dari prinsip

fundamental akan “menjaga harmoni agar bisa berjuang” – yaitu, kebebasan masing-masing akan tumbuh ketika bersentuhan dengan kebebasan orang yang lain.
Bukti yang tak perlu dipertanyakan dari definisi ini menjelaskan perkembangan progresif dari masyarakat manusia. Kekuatan harmoni dengan tujuan agar dapat hidup memiliki kekuatan dinamis yang superior dari kekuatan yang memisah-misahkan, merepresi dan menindas yang dilakukan oleh minoritas parasit. Karena hal-hal itulah masyarakat menjadi maju. Itulah mengapa masyarakat tidak hanya terdiri dari pembunuhan, reruntuhan dan ratapan.
Menyerap gagasan kebebasan ini memberikan keuntungan bagi kita, agar dapat terlindungi dari penanaman sufisme kelas menengah, agar dapat memahami apa arti kata “masyarakat”. Itu berarti bahwa kekuatan penggerak utama adalah kemanusiaan, yaitu harmoni dan asosiasi. Mari kita juga memahami bahwa MASYARAKAT adalah kumpulan dari individual yang membangunnya, dan bahwa ia tak memiliki kehidupan yang terpisah dari mereka; konsekunsinya adalah tidak akan ada pertanyaan soal tujuan kebahagiaan yang bukan merupakan kebahagiaan dari orang-orang yang membentuk masyarakat tersebut.
[bersambung]

***Émile Pouget** (1860-1931) adalah seorang anarko-komunis asal Prancis dan merupakan advokat berpengaruh di era awal Sindikalisme. Pada usia 19 tahun ia terlibat dalam pembentukan serikat pekerja tekstil,* **Syndicat des employés du textile**. *Tahun 1881 ia bergabung dengan kelompok anarkis Prancis dalam Kongres Internasional London, menyusul bubarnya Internasional Pertama. Ia pernah menjadi Wakil-Sekretaris Jenderal Konfederasi Buruh pada 1901-1908.*

Tags: aksi langsung | anarko-sindikalisme | Émile Pouget | mayday | serikat pekerja | sindikalisme

YOU MAY ALSO LIKE...

Sindikalis dalam Revolusi Rusia (Bag.1)
APRIL 29, 2016

Surganya Bossnapping: Memenuhi Tuntutan Pekerja
OCTOBER 17, 2017

Mikhail Bakunin
AUGUST 1, 2015

LEAVE A REPLY

BERLANGGANAN

Daftarkan surel anda untuk tulisan terbaru dari anarkis.org

Email Address

Mendaftar

TAGS

aksi langsung anarkisme anarkisme komunis anarko-feminisme anarko-sindikalisme antifasis Bandung bolshevik Buku buruh darwinisme sosial demokrasi demokrasi langsung demokrasi perwakilan dilar dirik ekologi-sosial feminisme gregori maximoff islam kapitalisme negara kelas menengah konflik agraria Marxisme mayday Munisipalisme Libertarian murray bookchin mutual

TENTANG ANARKIS.ORG

“Anarkis.org merupakan produk kerjasama antara organisasi-organisasi atau individu-individu anarkis yang sepakat dengan Pernyataan Editorial kami (lihat di bawah ini). Situs ini ditujukan untuk menjadi salah satu representasi wacana dan praktik gerakan anarkis di tengah gerakan revolusioner di Indonesia. Anarkis.org ditujukan untuk menjadi situs produksi, reproduksi dan distribusi wacana dan praktik anarkisme dalam bahasa Indonesia.”

aid Nasionalisme negara pendidikan penggusuran pengungsi pertambangan rasisme resensi Rojava sarjana anarkis serikat buruh serikat pekerja sindikalisme swakelola swaorganisasi SYRIZA ulasan yunani

Baca Pernyataan Editorial kami.

Pernyataan Editorial
Disclaimer
Kontak Kami

Copyleft - Anarkis.org